

Pengaruh Mekanisme Good Corporate Governance terhadap Luas Pengungkapan Corporate Social Responsibilities (CSR)

(Impact Good Corporate Governance Mechanism to Widely Corporate Social Responsibility Disclosure)

Hermiyetti
Universitas Bakrie
Hermiyetti@yahoo.com
Rizka Ramadhani
Universitas Bakrie
Rizka.madhani@gmail.com
Usmar
Universitas Moestopo
Usmar88@yahoo.com

Abstract

This study titled Effect of Good Corporate Governance Mechanism for widely Disclosure of Corporate Social Responsibilities (CSR), which aims to examine the influence and impact of variables of Good Corporate Governance Mechanism for widely Disclosure of Corporate Social Responsibilities (CSR). This study uses the variables size of the board of commissioners, the proportion of independent board of directors, audit committee size, the number of audit committee meetings, managerial ownership and concentrated ownership. While disclosure is measured by the number of items disclosed in the company contained in CSR Disclosure Index. The sample used in this study is a manufacturing company listed on the Stock Exchange in 2008-2010.

The results of this study demonstrate that, in partial measure of the commissioners, the proportion of the board, audit committee size, the number of audit committee meetings, no significant effect on widely CSR disclosure. While managerial ownership, and concentrated ownership significant effect on widely CSR disclosure. While simultaneously variables size of the board of commissioners, the proportion of independent board of directors, audit committee size, the number of audit committee meetings, managerial ownership and concentrated ownership has a significant effect on widely CSR disclosure.

Keyword: CSR, disclosure, corporate governance mechanisms, and disclosure of CSR

Abstrak

Penelitian ini berjudul Pengaruh Mekanisme Good Corporate Governance terhadap Luas Pengungkapan Corporate Social Responsibilities (CSR) yang bertujuan untuk menguji pengaruh dan dampak dari variabel variabel Mekanisme Good Corporate Governance terhadap Luas Pengungkapan Corporate Social Responsibilities (CSR). Penelitian ini menggunakan variabel ukuran dewan komisaris, proporsi dewan komisaris independen, ukuran komite audit, jumlah rapat komite audit, kepemilikan manajerial, dan kepemilikan saham terkonsentrasi. Sedangkan pengungkapan diukur dengan jumlah item yang diungkapkan dalam perusahaan yang terdapat dalam Indeks Pengungkapan CSR. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2008-2010.

Hasil dari penelitian ini membuktikan bahwa secara parsial ukuran dewan komisaris, proporsi dewan komisaris independen, ukuran komite audit, jumlah rapat komite audit, berpengaruh tidak signifikan terhadap pengungkapan CSR. Sedangkan kepemilikan manajerial, kepemilikan saham terkonsentrasi signifikan terhadap luas pengungkapan CSR. Sedangkan secara simultan variabel ukuran dewan komisaris, proporsi dewan komisaris independen, ukuran komite audit, jumlah rapat komite audit, kepemilikan manajerial, dan kepemilikan saham terkonsentrasi berpengaruh signifikan terhadap luas pengungkapan CSR.

Katakunci: CSR, pengungkapan, mekanisme GCG, pengungkapan CSR

I. PENDAHULUAN

Praktik dan pengungkapan CSR merupakan konsekuensi logis dari implementasi konsep *good corporate governance* (GCG) yang prinsipnya antara lain menyatakan bahwa perusahaan perlu memperhatikan kepentingan *stakeholder* sesuai dengan aturan yang ada dan menjalin kerja sama yang aktif dengan *stakeholder* demi kelangsungan jangka panjang perusahaan (OECD, 2004). Selain itu, Utama (2007) juga menyatakan bahwa mekanisme dan struktur *governance* di perusahaan dapat dijadikan sebagai infrastruktur pendukung terhadap praktik dan pengungkapan CSR di Indonesia.

Struktur *governance* yang berlandaskan prinsip GCG akan mendorong pelaksanaan kegiatan CSR dan pelaporannya. Jika struktur *governance* yang direpresentasikan oleh organ Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), dewan komisaris dan direksi didominasi oleh pemilik mayoritas dengan tujuan utama untuk memaksimumkan kekayaannya, maka kegiatan CSR beserta pelaporannya akan sulit berkembang di perusahaan tersebut. Sebaliknya, jika RUPS, dewan komisaris dan direksi mengutamakan kepentingan perusahaan, maka kegiatan dan pelaporan CSR seharusnya berjalan dengan baik. Perusahaan terbuka dan perusahaan yang menggunakan dana publik (seperti perusahaan yang mengeluarkan obligasi atau bank) saat ini diwajibkan memiliki komisaris independen. Komisaris ini diharapkan bebas dari kepentingan pribadi maupun kepentingan pihak-pihak tertentu (seperti pemegang saham mayoritas maupun minoritas) dan lebih mengutamakan kepentingan perusahaan secara keseluruhan, termasuk *stakeholder* perusahaan tersebut.

Kaihatu (2006) menyatakan bahwa mekanisme GCG akan bermanfaat dalam mengatur dan mengendalikn perusahaan sehingga menciptakan nilai tambah untuk semua *stakeholder*. Dua hal yang ditekankan dalam hal ini adalah pentingnya hak pemegang saham untuk memperoleh informasi yang benar dan tepat waktu. Serta kewajiban perusahaan untuk melakukan pengungkapan secara akurat, tepat waktu, transparan terhadap semua informasi kinerja perusahaan, kepemilikan, dan *stakeholder*.

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa aktivitas CSR tidak bisa terlepas dari penerapan GCG. Beberapa penelitian yang dilakukan oleh para peneliti sebelumnya yang telah menguji hubungan dan pengaruh antara kedua hal tersebut telah dilakukan baik di Indonesia maupun luar negeri. Salah satunya dilakukan oleh Said (2009) yang meneliti perusahaan-perusahaan publik di Malaysia yang telah terdaftar di bursa efek Malaysia sebagai objek penelitiannya. Hasil penelitian Said (2009) menunjukkan dua variabel yang berhubungan positif dengan pengungkapan CSR, yaitu kepemilikan oleh pemerintah dan independensi komite audit. Keduanya positif berkorelasi dengan tingkat pengungkapan CSR dimana variabel yang paling signifikan adalah kepemilikan oleh pemerintah. Hasil ini didukung oleh penelitian yang dilakukan Amran dan Devi (2008) yang menemukan bahwa semakin besar kepemilikan oleh pemerintah dapat meningkatkan pengungkapan CSR. Namun, hasil ini berbeda dengan penelitian Huafang dan Jianguo (2007) dalam Aini (2011) yang dilakukan di Cina, ditemukan bahwa kepemilikan pemerintah tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan CSR.

Struktur kepemilikan lain selain kepemilikan pemerintah adalah kepemilikan manajerial dan kepemilikan terkonsentrasi. Penelitian oleh Anggraini (2006) dan Rosmasista (2007) menemukan hubungan positif antara kepemilikan manajerial dan pengungkapan CSR. Manajer yang memiliki saham perusahaan akan menyelaraskan kepentingannya sebagai manajer dan sebagai pemegang saham (Rustiarini, 2009). Semakin besar kepemilikan manajerial dalam perusahaan maka semakin produktif tindakan manajer dalam memaksimalkan nilai perusahaan dan meningkatkan CSR *disclosure*. Hasil ini berbeda dengan penelitian Said (2009) yang menemukan kepemilikan manajerial tidak berhubungan positif dengan luas pengungkapan CSR.

Struktur kepemilikan saham yang lain yaitu kepemilikan saham terkonsentrasi. Kepemilikan terkonsentrasi diteliti oleh Matoussi dan Chakroun (2006) yang menemukan hubungan positif antara kepemilikan terkonsentrasi dengan pengungkapan CSR. Hasil berbeda terlihat

pada hasil penelitian Halme dan Huse (1997) serta Ghazali dan Wheetman (2006) dalam Said (2009) menemukan bahwa tidak terdapat hubungan positif antara kepemilikan terkonsentrasi dengan pengungkapan CSR. Kepemilikan terkonsentrasi mengakibatkan hak pemegang saham minoritas tidak memiliki kekuatan untuk berperan dalam menentukan keputusan strategi perusahaan. Penelitian Abdul Samad (2002) dalam Said (2009) menemukan bahwa kepemilikan saham di Malaysia sebagian besar adalah terkonsentrasi. Kepemilikan saham yang terkonsentrasi pada perusahaan mengakibatkan hak pemegang saham minoritas secara praktis tidak mempunyai kekuatan. Pemegang saham minoritas tidak dapat ikut serta menentukan keputusan implementasi strategi perusahaan dengan kuat. Menurut Nuryaman (2008), konsentrasi kepemilikan dapat menjadi mekanisme internal pendisiplinan manajemen sebagai salah satu mekanisme yang dapat digunakan untuk meningkatkan efektivitas monitoring. Kepemilikan yang besar menjadikan pemegang saham memiliki akses informasi yang cukup signifikan untuk mengimbangi keuntungan informasional yang dimiliki manajemen. Dalam hal ini kepemilikan mayoritas atau terkonsentrasi dapat mengurangi masalah agensi dan dapat mendorong pengungkapan CSR secara luas.

Mekanisme *corporate governance* yang lain adalah ukuran dewan komisaris. Dewan komisaris memiliki peran penting dalam *corporate governance* yaitu untuk mengawasi pengelola perusahaan atau manajemen agar bertindak dengan benar. Raheja (2003) dalam Said (2009) yang menyatakan bahwa semakin besar ukuran dewan maka semakin menurun kemampuan pengendalian perusahaan akibat kurangnya komunikasi yang efektif, sulitnya koordinasi serta sulitnya pengambilan keputusan dan cenderung dikendalikan oleh CEO. Hal ini dapat menyebabkan rendahnya kualitas CSR *disclosure* karena tidak mampu melaksanakan peran secara efisien. Menurut Sembiring (2005) ukuran dewan komisaris mempunyai hubungan positif yang signifikan dengan luas pengungkapan CSR di Indonesia. Hal ini berarti bahwa semakin banyak jumlah anggota dewan komisaris maka aktivitas pengawasan akan berjalan dengan baik dan tanggung jawab sosial yang diungkapkan perusahaan semakin besar.

Penelitian ini mengacu pada penelitian Said (2009) yang menggunakan sampel perusahaan publik di Malaysia. Penelitian tersebut menggunakan variabel karakteristik GCG antara lain ukuran dewan direksi, independensi dewan komisaris, *duality of CEO*, independensi komite audit, variabel kepemilikan manajerial, kepemilikan saham terkonsentrasi, serta kepemilikan oleh pemerintah. Penelitian yang dilakukan oleh Said tersebut menemukan bahwa hanya ada dua faktor yang berpengaruh positif signifikan terhadap luas pengungkapan CSR di Malaysia yaitu faktor kepemilikan oleh pemerintah dan komite audit.

Penelitian ini akan menghilangkan variabel ukuran dewan direksi karena sesuai dengan kondisi di Indonesia menerapkan sistem *two tier board system* yang memisahkan fungsi eksekutif (direksi) dan fungsi pengawasan (komisaris). Variabel kepemilikan saham oleh pemerintah tidak diadopsi karena jumlah emiten di Indonesia, yang dimiliki oleh pemerintah jumlahnya terlalu sedikit sehingga tidak cukup mewakili sampel penelitian.

Penelitian ini dimotivasi karena masih rendahnya kualitas dan kuantitas praktik pengungkapan tanggung jawab sosial di Indonesia jika dibandingkan dengan negara lain. Terjadinya *fenomena gap* ini dikarenakan perusahaan di Indonesia belum mampu menerapkan tata kelola perusahaan dengan baik. Sebagaimana disampaikan Utama (2007) bahwa *corporate governance* perusahaan akan menentukan arah dan kebijakan perusahaan termasuk diantaranya kegiatan CSR dan pelaporannya. Jika perusahaan di Indonesia sudah menerapkan GCG, seharusnya praktik pelaksanaan dan pengungkapan CSR akan semakin baik. Berkembangnya pedoman CSR dari waktu ke waktu menjadikan penilaian praktik CSR akan semakin berkembang. Selain itu, penelitian ini juga dimotivasi karena adanya *research gap* atau ketidak konsistenan hasil yang terjadi pada penelitian terdahulu.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis akan meneliti mengenai "*Pengaruh Mekanisme Good Corporate Governance (GCG) Terhadap Luas Pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR)*".

II. Perumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian latar belakang di atas, maka masalah penelitian yang dapat dirumuskan yaitu apakah ukuran dewan komisaris, proporsi dewan komisaris independen, ukuran komite audit, jumlah rapat komite audit, kepemilikan manajerial, dan kepemilikan saham terkonsentrasi secara parsial dan simultan berpengaruh terhadap luas pengungkapan CSR?

III. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini yaitu untuk menganalisis pengaruh mekanisme GCG terhadap luas pengungkapan CSR. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh ukuran dewan komisaris, proporsi dewan komisaris independen, ukuran komite audit, jumlah rapat komite audit, kepemilikan manajerial, dan kepemilikan saham terkonsentrasi secara parsial dan simultan terhadap luas pengungkapan CSR.

IV. Landasan Teori

a. Grand theory

Penelitian ini menggunakan teori keagenan (*Agency Theory*) dan teori legitimasi (*Legitimacy Theory*), dimana Teori keagenan merupakan salah satu dari dua teori utama dari ilmu *corporate governance* selain teori *stewardship* (Chinn, 2000; Shaw, 2003). Kaihatu (2006) menjelaskan bahwa teori keagenan memandang bahwa manajemen perusahaan sebagai agen bagi para pemegang saham, akan bertindak dengan penuh kesadaran bagi kepentingannya sendiri, bukan sebagai pihak yang arif dan bijaksana serta adil terhadap pemegang saham.

Teori ini digunakan untuk mempermudah memahami *good corporate governance*. Dalam teori ini dijelaskan hubungan keagenan antara dua pihak dimana satu atau lebih orang (*principal*) mempekerjakan orang lain (*agent*) untuk melaksanakan jasa atas nama mereka yang melibatkan pendelegasian wewenang pembuatan keputusan kepada agen

Setyapurnama dan Norpratiwi (2005) menjelaskan hubungan keagenan dapat menimbulkan masalah pada saat pihak-pihak yang bersangkutan mempunyai tujuan yang berbeda. Pemilik modal menghendaki bertambahnya kekayaan dan kemakmuran para pemilik modal, sedangkan manajer juga

menginginkan bertambahnya kesejahteraan bagi para manajer. Dengan demikian muncullah konflik kepentingan antara pemilik (investor) dengan manajer (agen). Pemilik lebih tertarik untuk memaksimalkan *return* dan harga sekuritas investasinya, sedangkan manajer mempunyai kebutuhan psikologis dan ekonomi yang luas, termasuk memaksimalkan kompensasinya. Healy dan Palepu (2001) menyatakan bahwa pengungkapan sukarela dapat memecahkan masalah keagenan dengan menyediakan media bagi pemegang saham untuk mendisiplinkan dan memonitor manajer.

Mekanisme pengawasan yang dimaksud dalam teori agensi dapat dilakukan dengan mekanisme GCG. GCG bisa menghasilkan berbagai mekanisme yang bertujuan untuk meyakinkan bahwa tindakan manajemen selaras dengan kepentingan pemegang saham (terutama *minority interest*). GCG diharapkan dapat berfungsi untuk menekan atau menurunkan biaya keagenan (Waryanto, 2010).

Sedangkan Teori legitimasi (*Legitimacy theory*) menjelaskan bahwa perusahaan beroperasi dalam lingkungan eksternal yang berubah secara konstan dan mereka berusaha meyakinkan bahwa perilaku mereka sesuai dengan batas-batas dan norma masyarakat (Michelon dan Parbonetti, 2010). Teori legitimasi memfokuskan pada interaksi antara perusahaan dengan masyarakat (Ghozali dan Chariri, 2007 dalam Ratnasari dan Pratiwi, 2010).

Berdasarkan hal tersebut, dapat dilihat bahwa kegiatan perusahaan harus memiliki nilai sosial yang selaras dengan nilai-nilai masyarakat. Ketika nilai yang dianut perusahaan berbeda dengan nilai masyarakat, legitimasi perusahaan akan berada pada posisi terancam. Perbedaan antara nilai-nilai perusahaan dan nilai-nilai masyarakat sering disebut sebagai "*legitimacy gap*" dan dapat mempengaruhi kemampuan perusahaan untuk melanjutkan kegiatan usahanya (Ghozali dan Chariri, 2007 dalam Ratnasari dan Pratiwi, 2010).

Perwujudan legitimasi dalam dunia bisnis dapat berupa pelaporan kegiatan sosial dan lingkungan perusahaan. Dengan mengungkapkan CSR, diharapkan perusahaan akan memperoleh legitimasi sosial dan memaksimalkan kekuatan keuangannya dalam jangka panjang (Kiroyan, 2006 dalam Sayekti

dan Wondabio, 2007). Deegan dan Cho dan Patten (2007) yang dikutip dari Michelin dan Parbonetti (2010) juga mengatakan bahwa perusahaan berusaha untuk memperoleh legitimasi dengan mengungkapkan data-data dan informasi mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan. Pengungkapan informasi CSR dalam laporan tahunan merupakan salah satu cara perusahaan untuk membangun, mempertahankan, dan melegitimasi kontribusi perusahaan dari sisi ekonomi dan politis (Sayekti dan Wondabio, 2007).

b. Ukuran Dewan Komisaris dan Luas Pengungkapan CSR

Dewan komisaris merupakan suatu mekanisme untuk mengawasi dan memberikan petunjuk serta arahan pada pengelola perusahaan atau pihak manajemen. Dalam hal ini manajemen bertanggung jawab untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing perusahaan sedangkan dewan komisaris bertanggung jawab untuk mengawasi manajemen (FCGI, 2002).

Berdasarkan teori agensi, dewan komisaris dianggap sebagai mekanisme pengendalian intern tertinggi yang bertanggung jawab untuk memonitor tindakan manajemen. Melalui peran monitoring oleh dewan komisaris, perusahaan dapat berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan dapat terjamin kelangsungannya (Sulastini, 2007). Jika dikaitkan dengan pengungkapan informasi oleh perusahaan, semakin besar ukuran dewan komisaris, maka komposisi pengalaman dan keahlian yang dimiliki oleh dewan komisaris akan semakin meningkat sehingga dapat melakukan aktivitas monitoring dengan lebih baik (Akhtaruddin, 2009). Dengan proses monitoring yang baik, maka diharapkan pengungkapan CSR semakin luas karena kemungkinan manajer untuk menyembunyikan informasi dapat dikurangi.

Sembiring (2005) dan Sulastini (2007) menyatakan adanya hubungan positif yang signifikan antara ukuran dewan komisaris dengan pengungkapan CSR di Indonesia. Hal ini berarti bahwa semakin banyak jumlah anggota dewan komisaris dalam suatu perusahaan, maka kegiatan pengawasan akan berjalan dengan baik dan pengungkapan CSR yang dibuat perusahaan semakin luas.

c. Proporsi Dewan Komisaris Independen dan Luas Pengungkapan CSR

Keberadaan komisaris independen telah diatur Bursa Efek Jakarta melalui peraturan BEJ tanggal 1 Juli 2000. Dikemukakan bahwa perusahaan yang terdaftar di BEJ harus mempunyai komisaris independen yang secara proporsional sama dengan jumlah saham yang dimiliki pemegang saham yang minoritas (bukan *controlling shareholders*). Dalam peraturan ini, persyaratan jumlah minimal komisaris independen adalah 30% dari seluruh anggota dewan komisaris (Waryanto, 2010).

Komisaris independen diperlukan untuk meningkatkan independensi dewan komisaris terhadap kepentingan pemegang saham (mayoritas) dan benar-benar menempatkan kepentingan perusahaan di atas kepentingan lainnya (Muntoro, 2006). Dengan demikian, semakin besar komposisi dewan komisaris independen maka kemampuan dewan komisaris untuk mengambil keputusan dalam rangka melindungi seluruh pemangku kepentingan dan mengutamakan perusahaan semakin objektif. Dengan kata lain, semakin besar komposisi komisaris independen, maka dewan komisaris dapat bertindak semakin objektif dan mampu melindungi seluruh pemangku kepentingan serta mampu mendorong pengungkapan CSR lebih luas.

Webb (2004) dalam Said (2009) meneliti perbedaan struktur dewan komisaris antara perusahaan "*socially responsible*" dengan perusahaan "*nonsocially responsible*". Hasil studi menunjukkan bahwa perusahaan "*socially responsible*" memiliki anggota komisaris independen lebih banyak dibandingkan pada perusahaan "*non-socially responsible*". Studi tersebut menunjukkan bahwa komisaris independen memegang peran penting untuk memonitoring dan memastikan perusahaan dikelola secara benar sehingga dapat meningkatkan citra baik perusahaan.

Komposisi dewan komisaris independen yang semakin besar dapat mendorong dewan komisaris untuk bertindak objektif dan mampu melindungi seluruh *stakeholders* perusahaan sehingga hal ini dapat mendorong pengungkapan CSR lebih luas. Komisaris independen diperlukan untuk meningkatkan independensi dewan komisaris terhadap kepentingan pemegang saham dan

benar-benar menempatkan kepentingan perusahaan diatas kepentingan lainnya (Muntoro, 2006).

Semakin tinggi proporsi komisaris independen akan meningkatkan kualitas pengungkapan perusahaan. Keberadaan komisaris independen dapat mendorong dewan komisaris mengambil keputusan secara objektif yang melindungi seluruh pemangku kepentingan. Sebagai pihak yang independen, mereka akan mendorong anggota dewan komisaris lain untuk melakukan tugas pengawasan lebih baik lagi. Hal tersebut dilakukan agar dapat melindungi seluruh pemangku kepentingan dari tindakan agen yang menyimpang. Jika pengawasan telah dilakukan dengan efektif, maka pengelolaan perusahaan akan dilakukan dengan baik pula, dan manajemen akan mengungkapkan semua informasi yang ada, termasuk tanggung jawab sosial. Hal tersebut sejalan dengan pernyataan Rosenstein dan Wyatt (1990) dalam Said (2009) yang menyebutkan bahwa komisaris independen dapat memonitoring secara lebih baik pengelolaan perusahaan sehingga akan meningkatkan jumlah informasi yang akan dilaporkan dalam pengungkapan sukarela.

d. Ukuran Komite Audit dan Luas Pengungkapan CSR

Dalam Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep-29/PM/2004 yang termuat dalam peraturan Nomor IX.1.5 disebutkan bahwa komite audit yang dimiliki oleh perusahaan minimal terdiri dari tiga orang dimana sekurang-kurangnya 1 (satu) orang komisaris independen dan 2 (dua) orang anggota lainnya berasal dari luar emiten atau perusahaan publik. Jumlah anggota komite audit harus disesuaikan dengan kompleksitas perusahaan dengan tetap memperhatikan efektifitas dalam pengambilan keputusan (Waryanto, 2010).

Menurut KNKG (2006), salah satu tugas komite audit adalah untuk memastikan bahwa struktur pengendalian internal perusahaan dilakukan dengan baik. Keberadaan komite audit dapat mempengaruhi pengungkapan yang dilakukan perusahaan secara signifikan (Ho dan Wong 2001 dalam Akhtaruddin, 2009). Said (2009) menjelaskan bahwa ukuran komite audit memiliki pengaruh yang signifikan terhadap luas pengungkapan CSR. Komite audit merupakan komite yang bertugas membantu dewan komisaris dalam

melakukan mekanisme pengawasan terhadap manajemen. Komite audit dianggap sebagai alat yang efektif untuk melakukan mekanisme pengawasan sehingga dapat mengurangi biaya agensi dan meningkatkan kualitas pengungkapan informasi perusahaan. Keberadaan komite audit membantu menjamin pengungkapan dan sistem pengendalian akan berjalan dengan baik. Dengan demikian diharapkan melalui ukuran komite audit yang semakin besar maka pengawasan yang dilakukan akan semakin baik dan kualitas pengungkapan informasi sosial yang dilakukan perusahaan semakin meningkat (Nasir dan Abdullah, 2004)

e. Jumlah Rapat Komite Audit dan Luas Pengungkapan CSR

Berdasarkan keputusan ketua Bapepam Nomor Kep-24/PM/2004 dalam peraturan Nomor IX.1.5 disebutkan bahwa komite audit mengadakan rapat sekurang-kurangnya sama dengan ketentuan minimal rapat dewan komisaris yang ditetapkan dalam anggaran dasar perusahaan. Dalam menjalankan tugasnya komite audit melakukan rapat atau pertemuan untuk melakukan koordinasi agar dapat menjalankan tugas secara efektif dalam hal pengawasan laporan keuangan, pengendalian internal, dan pelaksanaan *good corporate governance* perusahaan. Dengan semakin seringnya rapat yang diadakan oleh komite audit, maka diharapkan koordinasi antar komite audit semakin baik sehingga dapat menjalankan tugas masing-masing dengan efektif.

Penelitian Putri (2009) menemukan adanya hubungan antara jumlah pertemuan komite audit yang berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan informasi laba. Hal ini berarti semakin sering komite audit mengadakan pertemuan rutin, maka pengungkapan informasi laba perusahaan semakin transparan. Dengan demikian semakin sering rapat atau pertemuan komite audit maka dapat menambah keefektifan pengawasan manajemen, penerapan prinsip GCG, serta mendukung peningkatan pengungkapan CSR. Penelitian Waryanto (2010) menyatakan bahwa faktor jumlah rapat komite audit tidak berpengaruh terhadap luas pengungkapan CSR pada laporan tahunan perusahaan di Indonesia

Fatayatiningrum (2011) menyatakan bahwa tingkat jumlah pertemuan yang

dilakukan oleh komite audit dapat menjamin pelaksanaan pengawasan secara efektif terhadap manajemen untuk melakukan kecurangan. Dengan adanya pengawasan yang efektif tersebut maka peluang manajemen untuk melakukan kecurangan dengan menyembunyikan informasi dapat diminimalisasi.

f. Kepemilikan Manajerial dan Luas Pengungkapan CSR

Dalam mekanisme pelaksanaan GCG, kepemilikan manajerial digunakan sebagai suatu upaya untuk mengurangi konflik agensi atau konflik kepentingan antara manajer dan pemilik (Said, 2009). Dengan kepemilikan manajerial, maka manajemen akan secara efektif ikut serta dalam pengambilan keputusan. Semakin besar kepemilikan manajerial di dalam perusahaan maka semakin produktif tindakan manajer dalam memaksimalkan nilai perusahaan. Namun, di dalam penelitian Said (2009) tidak ditemukan hubungan antara kepemilikan manajerial dan CSR. Hal serupa terjadi pada penelitian Barnea dan Rubin (2006) dalam Murwaningsih (2009) tidak ditemukan hubungan antara kepemilikan manajerial dengan CSR.

Dengan kepemilikan manajerial, maka tindakan oportunis manajer untuk memaksimalkan kepentingan pribadi akan berkurang. Manajer perusahaan akan mengambil keputusan sesuai dengan kepentingan perusahaan yaitu dengan cara mengungkapkan informasi sosial yang seluas-luasnya dalam rangka untuk meningkatkan *image* perusahaan meskipun manajer harus melakukan pengorbanan sumber dayanya untuk melakukan aktivitas tersebut (Anggraini, 2006).

Penelitian mengenai hubungan kepemilikan manajerial dengan CSR *disclosure* dilakukan oleh Anggraini (2006) yang hasilnya ditemukan terdapat hubungan antara kepemilikan manajerial dan CSR. Rosmasita (2007) juga menemukan bahwa kepemilikan saham manajerial berpengaruh terhadap luas pengungkapan CSR di Indonesia. Penelitian Nasir dan Abdulah (2004) menunjukkan hasil signifikan bahwa

terdapat hubungan positif antara kepemilikan saham manajerial dengan luas pengungkapan CSR.

g. Kepemilikan Saham Terkonsentrasi dan Luas Pengungkapan CSR

Struktur kepemilikan saham mencerminkan distribusi kekuasaan dan pengaruh diantara pemegang saham atas kegiatan operasional perusahaan. Salah satu karakteristik struktur kepemilikan adalah konsentrasi kepemilikan yang terbagi dalam dua bentuk struktur kepemilikan, yaitu kepemilikan terkonsentrasi dan kepemilikan menyebar (Nuryaman, 2008). Kepemilikan saham dikatakan terkonsentrasi jika sebagian besar saham dimiliki oleh sebagian kecil individu atau kelompok sehingga pemegang saham tersebut memiliki jumlah saham yang relatif dominan dibandingkan dengan yang lainnya.

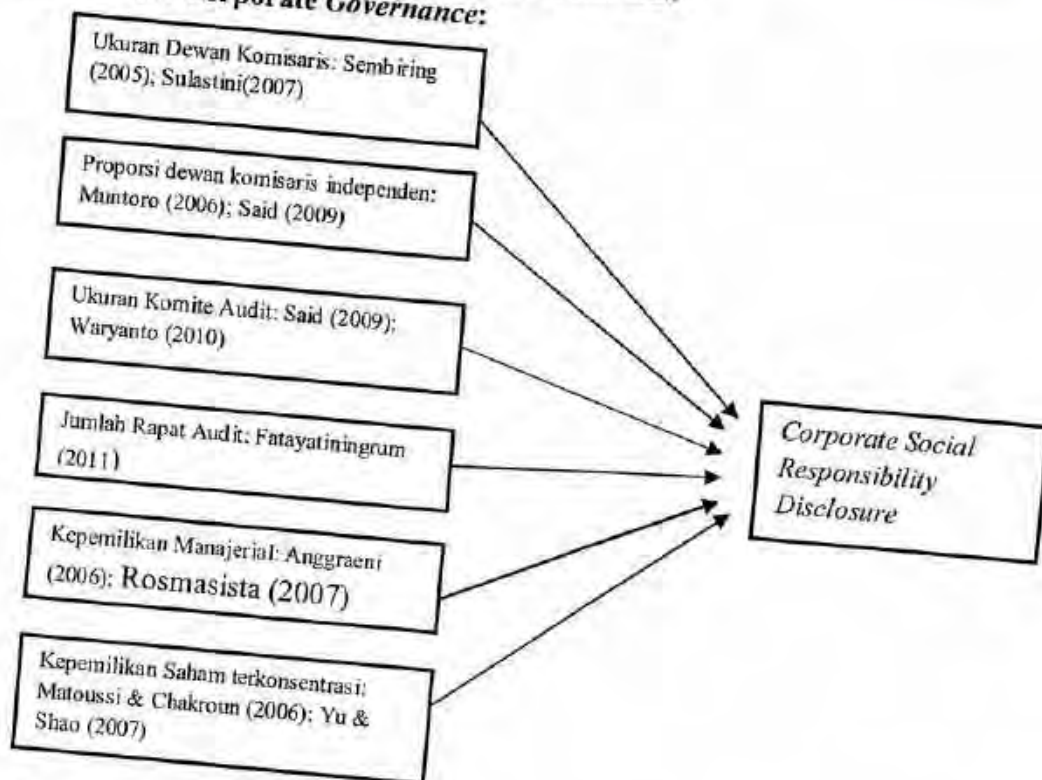
Matoussi dan Chakroun (2006) menemukan pengaruh positif kepemilikan terkonsentrasi terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial. Menurutnya, kepemilikan yang terkonsentrasi akan mengurangi kuantitas saham di perusahaan sehingga dapat mengurangi konflik antara manajemen dengan *stockholder*. Semakin sedikit kuantitas *stockholder*, manajemen akan lebih mudah mengelola kepentingan yang lebih sedikit tersebut. Hal ini dapat mengurangi konflik sehingga pengawasan pun akan mudah dilakukan dan pengungkapan CSR akan semakin luas.

Menurut Yu dan Shao (2007) kepemilikan yang terkonsentrasi merupakan cara efektif untuk menurunkan biaya agensi dan melakukan proses monitoring dengan baik. Dengan kepemilikan saham yang terkonsentrasi, maka pemegang saham dapat mengimbangi informasi yang dimiliki oleh manajer. Proses monitoring dari pihak pemegang saham terhadap manajemen dapat berjalan dengan baik dan tindakan oportunis manajemen untuk menyembunyikan informasi dapat berkurang. Dengan demikian dapat mendorong pengungkapan CSR untuk dilakukan dengan lebih luas. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Gambar 1

Kerangka Pemikiran

Mekanisme Corporate Governance:



V. Hipotesis

Dari penjelasan kerangka pemikiran di atas, maka dapat diturunkan hipotesa sebagai berikut:

- H_1 = Ukuran dewan komisaris berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan CSR
- H_2 = Proporsi dewan komisaris independen berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan CSR
- H_3 = Ukuran komite audit berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan CSR
- H_4 = Jumlah rapat komite audit berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan CSR
- H_5 = Kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan CSR
- H_6 = Kepemilikan saham terkonsentrasi berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan CSR

VI. Metode Penelitian

a. Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2008-2010 karena perusahaan manufaktur lebih banyak mempunyai pengaruh/dampak terhadap lingkungan di sekitarnya sebagai akibat dari aktivitas yang dilakukan perusahaan.

Metode pengambilan sampel yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode *purposive sampling*. Dalam penelitian ini, perusahaan yang dijadikan sampel adalah 39 perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2008-2010 yang memiliki kriteria-kriteria sebagai berikut berikut:

1. Perusahaan-perusahaan yang terdaftar di BEI selama tahun 2008-2010;
2. Perusahaan tersebut menerbitkan *annual report* yang dapat diakses untuk periode 2008-2010;
3. Perusahaan yang memiliki data yang lengkap terkait dengan variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian.

b. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan cara menelusuri laporan tahunan perusahaan yang terpilih menjadi sampel. Penelitian ini

menggunakan data-data laporan tahunan dari perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI untuk periode 2008-2010. Data diperoleh dari website Bursa Efek Indonesiaserta website masing-masing perusahaan.

c. Operasionalisasi Variabel

Variabel penelitian yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari variabel dependen yaitu luasnya pengungkapan CSR dan variabel independen yaitu mekanisme *corporate governance*. Operasionalisasi variabel adalah sebagai berikut

Tabel 1: Operasionalisasi Variabel

Jenis Variabel	Konsep Variabel	Indikator	Skala
Variabel Independen (X)	X1= Ukuran dewan komisaris	jumlah anggota dewan komisaris dalam suatu perusahaan yang disebutkan di dalam <i>annual report</i>	Nominal
	X2= Proporsi dewan komisaris independen	Persentase antara jumlah anggota komisaris independen dibandingkan dengan jumlah total anggota dewan komisaris.	Rasio
	X3= Ukuran komite audit	jumlah anggota komite audit dalam laporan tahunan yang tercantum dalam laporan tata kelola perusahaan.	Nominal
	X4= Jumlah rapat komite audit	melihat jumlah rapat oleh komite audit pada laporan tahunan perusahaan yang tercantum pada laporan tata kelola perusahaan maupun laporan komite audit.	Nominal
	X5= Kepemilikan saham manajerial	Persentase jumlah lembar saham yang dimiliki oleh pihak manajemen dibagi jumlah lembar saham yang beredar	Rasio
	X6= Kepemilikan saham terkonsentrasi	Variabel <i>dummy</i> , kepemilikan saham terkonsentrasi=1 kepemilikan saham menyebar=0	Nominal
Variabel Dependen (Y)	Y= CSR disclosure	N= jumlah item yang diungkapkan perusahaan jumlah item pengungkapan lingkungan GRI	Nominal

VII. Metode Analisis Data

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda. Sebelum melakukan uji hipotesis, terlebih dahulu harus dilakukan pengujian asumsi klasik. Dalam Uji statistik dengan menggunakan regresi, model dikatakan

baik jika model tersebut memenuhi asumsi normalitas data dan terbebas dari asumsi-asumsi klasik statistik antara lain uji normalitas, uji heteroskedastisitas dan uji multikolinearitas serta uji Autokorelasi dengan menggunakan Durbin Watson.

2. Rata-rata proporsi dewan komisaris independen adalah 0.4183 dalam rentang minimum dan maksimum yaitu 0.20 sampai dengan 0.80. Proporsi dewan komisaris independen menunjukkan jumlah dewan komisaris independen dibandingkan dengan jumlah keseluruhan dewan komisaris yang ada dalam suatu perusahaan. Perusahaan yang memiliki nilai proporsi dewan komisaris independen diatas rata-rata yaitu sejumlah 13 perusahaan atau 33.33% dari jumlah sampel secara keseluruhan. Deviasi standar dari variabel ukuran dewan komisaris ini adalah sebesar 0.1387. Dengan standar deviasi yang kecil tersebut menunjukkan bahwa tidak banyak *variance* atau kesenjangan yang cukup besar dari proporsi dewan komisaris independen. Jika melihat pada peraturan BEI tanggal 1 Juli 2000 yang mensyaratkan minimal komisaris independen adalah 30% dari seluruh anggota dewan komisaris, maka rata-rata perusahaan yang listed di BEI telah memenuhi persyaratan tersebut.
3. Rata-rata ukuran komite audit adalah 3.15 dengan nilai minimum 3 dan maksimum 4 serta standar deviasi 0.366. Ukuran komite audit menunjukkan jumlah komite audit yang ada dalam suatu perusahaan. Perusahaan yang memiliki nilai ukuran komite audit di atas rata-rata yaitu sejumlah 6 perusahaan atau 15.38% dari jumlah sampel secara keseluruhan. Jika dilihat, sebagian besar perusahaan memiliki komite audit sebanyak 3 orang yang mengindikasikan perusahaan telah mentaati peraturan dari Bapepam-LK Nomor Kep-29/PM/2004 nomor IX.1.5 mengenai Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit. Ukuran komite audit yang semakin besar akan mendukung pengawasan terhadap kinerja manajemen dan mendukung pelaksanaan GCG yang lebih baik sehingga informasi sosial yang diberikan terhadap para stakeholder akan lebih luas.
4. Rata-rata jumlah rapat komite audit adalah 7.18 dengan jumlah rapat paling sedikit 1 dan paling banyak 16 dalam satu tahun dan standar deviasi 4.46. Perusahaan yang memiliki jumlah rapat komite audit diatas rata-rata yaitu sejumlah 15 perusahaan atau 38.46% dari jumlah sampel secara keseluruhan. Jumlah rapat yang disertakan dalam penelitian ini adalah rapat formal yang disajikan dalam laporan tahunan perusahaan. Dalam menjalankan tugasnyakomite audit melakukan rapat atau pertemuan untuk melakukan koordinasi agardapat menjalankan tugas secara efektif dalam hal pengawasan laporan keuangan, pengendalian internal, dan pelaksanaan *good corporate governance* perusahaan. Dengan semakin seringnya rapat yang diadakan oleh komite audit, maka diharapkan -koordinasi antar komite audit semakin baik sehingga dapat menjalankan tugas masing-masing dengan efektif.
5. Rata-rata kepemilikan saham oleh manajer adalah 7.6911 dengan kepemilikan saham paling sedikit 0.0004 dan paling banyak 75.7623 dan standar deviasi 17.3204 yang menunjukkan adanya variansi yang sangat besar. Perusahaan yang memiliki kepemilikan manajerial diatas rata-rata yaitu sejumlah 9 perusahaan atau 23.08% dari jumlah sampel secara keseluruhan. Semakin besar kepemilikan saham oleh manajemen maka akan semakin besar pengaruh manajemen dalam melakukan pengawasan dan pengambilan keputusan sesuai dengan kepentingan perusahaan seperti pengungkapan informasi sosial yang dapat meningkatkan *image* perusahaan (Anggraini, 2006)
6. Rata-rata kepemilikan terkonsentrasi adalah 0.62 dengan nilai terkecil adalah 0 dan nilai yang terbesar adalah 1 dan standar deviasi 0.493 yang menunjukkan variansi di dalam kepemilikan terkonsentrasi. Nilai 1 dalam variabel kepemilikan terkonsentrasi menunjukkan bahwa perusahaan tersebut mempunyai

kepemilikan saham yang terkonsentrasi sedangkan nilai 0 menunjukkan bahwa perusahaan bersifat tidak terkonsentrasi atau menyebar. Semakin tingginya kepemilikan terkonsentrasi maka akan mampu menurunkan biaya agensi karena konflik dapat dikurangi dan proses monitoring akan berjalan dengan baik. Pemegang saham terkonsentrasi akan mengimbangi informasi yang dimiliki oleh manajemen.

7. Rata-rata indeks CSR adalah 14.83% dengan jumlah indeks paling sedikit 0.059524 dan paling banyak 0.345238. Perusahaan yang memiliki indeks CSR diatas rata-rata yaitu sejumlah 21 perusahaan atau 53.85% dari jumlah sampel secara keseluruhan. Melihat rata-rata tersebut, berarti perusahaan hanya mengungkapkan CSR-nya menurut GRI 3.1 sebesar 14.83%.

a. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik dilakukan dengan melakukan uji normalitas data. Uji normalitas data dipergunakan untuk menentukan apakah data terdistribusi secara normal atau tidak. Pengujian normalitas dilakukan dengan menggunakan analisis grafik histogram, dan analisis statistik One-Sample Kolmogorov-Smirnov (Uji K-S). Hasil analisis menggunakan grafik histogram dimana hasilnya menunjukkan pola distribusi normal sebab grafik memperlihatkan sebaran yang mengikuti kurva normal hal ini ditunjukkan dengan kurva yang berbentuk lonceng.

Selain menggunakan analisis grafik, untuk semakin menguatkan pengujian normalitas maka dilakukan analisis statistik dengan menggunakan One-Sample Kolmogorov-Smirnov (Uji K-S). Berdasarkan uji tersebut dinyatakan bahwa model regresi dalam penelitian ini memenuhi asumsi

normalitas sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi memenuhi asumsi normalitas.

Hasil uji heteroskedastisitas menunjukkan bahwa grafik scatterplot antara SRESID dan ZPRED menunjukkan pola penyebaran dimana titik-titik menyebar di atas dan di bawah 0 pada sumbu Y. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada data yang akan digunakan, sedangkan uji multikolinearitas menunjukkan hasil bahwa UKOM, INKOM, UDIT, RADIT, MANJ, dan KONST menunjukkan nilai tolerance > 0.10 dan nilai VIF < 10 . Dapat disimpulkan bahwa variabel independen yang digunakan dalam model regresi penelitian ini adalah terbebas dari multikolinearitas.

Sedangkan untuk menguji apakah dalam model terdapat autokorelasi dilakukan dengan menggunakan table Durbin Watson 2.055. Dari hasil tersebut diketahui nilai Durbin Watson berada diantara nilai dU dan 4-dU sehingga disimpulkan tidak terjadi autokorelasi.

b. Analisis Regresi

Dari uji asumsi klasik di atas dapat disimpulkan bahwa data yang ada terdistribusi secara normal serta tidak terdapat multikolinearitas, heteroskedastisitas dan autokorelasi. Dengan demikian persyaratan untuk melakukan analisis regresi linear berganda telah terpenuhi untuk melakukan pengujian terhadap hipotesis.

c. Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi digunakan untuk menguji *goodness of-fit* dari model regresi yaitu seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Dalam penelitian ini nilai koefisien determinasi yang dipakai adalah nilai R^2 (*R-Square*). Nilai koefisien determinasi dari model penelitian disajikan pada Tabel 3.

Tabel 3
Hasil Uji Koefisien Determinasi
Model Summary^a

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.702 ^a	.493	.398	.06354769

a. Predictors: (Constant), KONST, UKOM, INKOM, UDIT, MANJ, RADIT

b. Dependent Variable: CSRI

Sumber: Output dari SPSS 16.0

Pada table 3 di atas dapat dilihat besar nilai *adjusted R²* sebesar 0,398 yang berarti variabilitas variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variabel independen adalah sebesar 39,8%. Hal ini berarti 39,8 % pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan dipengaruhi oleh variabel ukuran dewan komisaris, proporsi dewan komisaris independen ukuran komite audit jumlah rapat komite audit, kepemilikan manajerial, serta kepemilikan terkonsentrasi. Keenam variabel tersebut yang merupakan mekanisme internal CG dapat mempengaruhi manajemen sebesar 39,8% dalam menjalankan dan mengambil

keputusan di dalam perusahaan dalam pelaksanaan pengungkapan CSR. Sisanya sebesar 60,8% dapat dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini seperti mekanisme eksternal CG yang meliputi kondisi pasar, ekonomi, dan faktor lainnya.

d. Hasil Uji F (Simultan)

Pengujian ini bertujuan untuk menunjukkan apakah semua variabel independen yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Hasil uji-F dapat dilihat pada tabel 4.

Tabel 4
Hasil Uji F

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	.126	6	.021	5.182	.001 ^a
	Residual	.129	32	.004		
	Total	.255	38			

a. Predictors: (Constant), KONST, UKOM, INKOM, UDIT, MANJ, RADIT

b. Dependent Variable: CSRI

Sumber: Output dari SPSS 16.0

Dari hasil pengujian ini, pada table 4 di atas dapat dilihat pada nilai F hitung sebesar 5,182 > 2,4 (F tabel). Pada tabel hasil uji F dihasilkan tingkat signifikansi 0,001. Dengan menggunakan tingkat signifikansi 5% maka H_0 ditolak dan H_1 diterima. Penolakan H_0 dibuktikan dengan hasil perhitungan bahwa nilai signifikansi 0,001 < 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel UKOM, INKOM, UDIT, RADIT, MANJ, dan KONST secara bersama-sama (simultan) mempengaruhi variabel pengungkapan CSR (CSRI). Dengan adanya dewan komisaris, komisaris independen, komite audit yang efektif dalam menjalankan

tugasnya masing-masing serta manajemen yang juga memiliki kendali dalam memutuskan dan melaksanakan keputusan perusahaan, serta adanya koordinasi yang baik antar organ perusahaan agar dapat mematuhi dan melaksanakan peraturan yang ada, maka pengungkapan CSR yang lebih luas dapat dilakukan.

e. Hasil Uji t (Parsial)

Uji t dilakukan untuk memeriksa lebih lanjut manakah diantara keenam variabel independen yang berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Hasil uji-t dapat dilihat pada

Tabel 5.

asumsi variabel lain tetap, maka akan meningkatkan pengungkapan CSR sebesar 0.001 (0.1%).

6. Variabel kepemilikan manajerial (MANJ) memiliki nilai +0.002. Nilai tersebut menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap pengungkapan CSR. Hal ini menggambarkan bahwa jika kepemilikan manajerial naik satu satuan, dengan asumsi variabel lain tetap, maka akan meningkatkan pengungkapan CSR sebesar 0.002 (0.2%).
7. Variabel kepemilikan terkonsentrasi (KONST) memiliki nilai +0.088. Nilai tersebut menunjukkan bahwa kepemilikan terkonsentrasi berpengaruh positif terhadap pengungkapan CSR. Hal ini menggambarkan bahwa jika kepemilikan terkonsentrasi naik satu satuan, dengan asumsi variabel lain tetap, maka akan meningkatkan pengungkapan CSR sebesar 0.088 (8.8%).

Hasil pengujian hipotesis secara parsial (uji-t) dan besarnya nilai signifikansi dapat dilihat pada table 5. Berdasarkan hasil pengujian tersebut maka dapat dianalisis mengenai pengujian hipotesis yang telah dibuat sebelumnya sebagai berikut :

1. Hipotesis 1 : Ukuran dewan komisaris berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan CSR

Pengujian hipotesis 1 pada tabel 5 menunjukkan bahwa variabel ukuran dewan komisaris mempunyai t hitung sebesar $1.937 < 1.69$ (t tabel). Karena t hitung lebih kecil dari pada t tabel maka maka H_0 diterima, artinya tidak ada pengaruh yang signifikan antara ukuran dewan komisaris terhadap luas pengungkapan CSR. Nilai signifikansi yang dihasilkan adalah 0.062 yang berarti lebih besar dari level 0.05 ($0.062 > 0.05$) menunjukkan bahwa tidak ada pengaruh yang signifikan antara proporsi dewan komisaris independen terhadap luas pengungkapan CSR. Dari hasil pengujian diperoleh bahwa hipotesis 1 yang menyatakan bahwa ukuran dewan komisaris berpengaruh positif terhadap pengungkapan CSR ditolak karena hasil pengujian membuktikan bahwa ukuran dewan komisaris berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan CSR namun tidak signifikan.

Hasil penelitian ini konsisten dengan penemuan Matoussi dan Chakroun (2008), Said (2009), Ratnasari (2010) serta Ratnasari (2010) bahwa ukuran dewan komisaris tidak mempengaruhi luas pengungkapan CSR. Ketentuan di Indonesia dalam UU No. 40 tahun 2007 menyebutkan bahwa perseroan yang kegiatan usahanya berkaitan dengan menghimpun dan/atau mengelola dana masyarakat, menerbitkan surat pengakuan utang kepada masyarakat atau perseroan terbuka wajib mempunyai paling sedikit 2 orang anggota dewan komisaris. Hal ini berarti besar kecilnya ukuran dewan komisaris tidak dapat menjamin adanya mekanisme pengawasan yang lebih baik karena bukan merupakan faktor penentu utama dari efektivitas pengawasan terhadap manajemen perusahaan. Kemampuan manusia untuk berdiskusi dan bernegosiasi adalah terbatas. Ukuran dewan komisaris yang terlalu besar akan dapat membuat proses menjadi sulit, panjang, dan "bertele-tele" sehingga dewan komisaris tidak dapat menjalankan fungsinya secara efektif (Muntoro, 2006).

Efektivitas mekanisme pengawasan dan pengendalian yang dilakukan oleh dewan komisaris tergantung pada nilai norma, dan kepercayaan yang diterima dalam suatu organisasi (Jennings 2004a; 2004b; 2005a; Oliver (2004) dalam Ujijantho dan Pramika (2007) dalam Waryanto (2010). Untuk menentukan jumlah anggota dewan komisaris harus diperhatikan mengenai komposisi, kemampuan, dan integritas anggota sehingga mampu memberikan arahan kepada manajemen dengan baik untuk mencapai transparansi dan mengungkapkan informasi CSR dengan lebih luas.

2. Hipotesis 2 : Proporsi dewan komisaris independen berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan CSR

Berdasarkan pengujian hipotesis 2 pada tabel 5 di atas, menunjukkan bahwa variabel proporsi dewan komisaris independen mempunyai t hitung sebesar $-1.483 < 1.69$ (t tabel). Karena t hitung lebih kecil daripada t tabel maka H_0 diterima, artinya tidak ada pengaruh signifikan antara proporsi dewan komisaris independen terhadap luas

pengungkapan CSR. Nilai signifikansi yang dihasilkan adalah 0.148 yang berarti lebih besar dari level 0.05 ($0.148 > 0.05$) menunjukkan bahwa tidak ada pengaruh signifikan antara proporsi dewan komisaris independen terhadap luas pengungkapan CSR. Dari hasil pengujian diperoleh bahwa hipotesis 2 yang menyatakan bahwa proporsi dewan komisaris independen berpengaruh positif terhadap pengungkapan CSR ditolak karena hasil pengujian membuktikan bahwa proporsi dewan komisaris independen berpengaruh negatif terhadap luas pengungkapan CSR dan tidak signifikan.

Hasil ini konsisten dengan penelitian Said (2009), dan Waryanto (2010) yang menunjukkan bahwa proporsi dewan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap luas pengungkapan CSR perusahaan. Dengan demikian keberadaan atau proporsi komisaris independen tidak dapat mempengaruhi proses pengambilan keputusan dikarenakan mereka tidak mempunyai hubungan dengan aktivitas atau operasi sehari-hari perusahaan (Che Ahmad, 2003 dalam Hashim dan Devi 2007).

Alasan yang dapat menjelaskan hal ini adalah dimungkinkan karena pemilihan dan pengangkatan komisaris independen yang kurang efektif (FCGI, 2002 dalam Waryanto, 2010). Hal ini merupakan isu atau hal yang penting bahwa banyak anggota dewan komisaris tidak memiliki kemampuan dan tidak dapat menunjukkan independensinya atau sebenarnya tidak independen (not truly independent) sehingga fungsi pengawasan tidak dapat berjalan dengan baik (Vethanayagam, 2006 dalam hashim dan Devi, 2007).

Dewan komisaris independen dinilai belum memiliki kemampuan untuk menjalankan peran dan fungsinya dengan baik. Peran dewan komisaris independen untuk memberikan kontrol serta monitoring terhadap manajemen dalam operasional perusahaan termasuk dalam pelaksanaan dan pengungkapan aktivitas tanggung jawab sosial belum berjalan dengan baik. Dengan demikian, keberadaan atau proporsi komisaris independen tidak dapat mempengaruhi

pengambilan keputusan mengenai pengungkapan CSR.

3. Hipotesis 3 : Ukuran komite audit berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan CSR

Pengujian hipotesis 3 pada tabel 5 diatas menunjukkan bahwa variabel ukuran komite audit mempunyai t hitung sebesar $-0.342 < 1.69$ (t tabel). Karena t hitung lebih kecil dari pada t tabel maka H_0 diterima, artinya tidak ada pengaruh signifikan antara ukuran komite audit terhadap luas pengungkapan CSR. Nilai signifikansi yang dihasilkan adalah 0.148 yang berarti lebih besar dari level 0.05 ($0.148 > 0.05$). Menunjukkan bahwa tidak ada pengaruh signifikan antara proporsi dewan komisaris independen terhadap luas pengungkapan CSR. Dari hasil pengujian diperoleh bahwa hipotesis 3 yang menyatakan bahwa ukuran komite audit berpengaruh positif terhadap pengungkapan CSR ditolak karena hasil pengujian membuktikan bahwa ukuran komite audit berpengaruh negatif terhadap luas pengungkapan CSR dan tidak signifikan.

Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian Mohd-Nasir dan Abdullah (2004) dan Akhtaruddin (2009) yang menemukan bahwa tidak terdapat pengaruh antara ukuran komite audit dengan tingkat pengungkapan CSR. Alasan yang dapat digunakan untuk menjelaskan hal ini adalah berdasarkan table 4.2 (statistik deskriptif) dari data yang telah diolah diketahui bahwa rata-rata ukuran komite audit hanya 3 orang yang artinya bahwa sebagian besar perusahaan memiliki jumlah anggota komite audit yang sama yaitu 3. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa ukuran komite audit akan menjadi tidak berpengaruh terhadap mekanisme pengawasan dan pengungkapan CSR karena mengindikasikan jumlah anggota komite audit tersebut hanya sebagai formalitas untuk memenuhi peraturan Bapepam-LK Nomor Kep-29/PM/2004 nomor IX.1.5 tentang pembentukan dan pedoman pelaksanaan kerja komite audit tanpa mempertimbangkan efektivitas dan kompleksitas perusahaan (Waryanto, 2010).

Rosmasista (2007). Konflik kepentingan antara manajer dengan pemilik menjadi semakin besar ketika kepemilikan manajer terhadap perusahaan semakin kecil. Manajer akan berusaha untuk memaksimalkan kepentingan dirinya dibandingkan kepentingan perusahaan. Sebaliknya semakin besar kepemilikan manajer di dalam perusahaan maka semakin produktif tindakan manajer dalam memaksimalkan nilai perusahaan, dengan kata lain biaya kontrak dan pengawasan menjadi rendah. Semakin besar kepemilikan manajer di dalam perusahaan, manajer perusahaan akan semakin banyak mengungkapkan informasi sosial. Hasil yang diperoleh ini menunjukkan bahwa semakin banyak kepemilikan manajemen di dalam perusahaan, manajemen akan semakin banyak melakukan kegiatan produktif yang mampu meningkatkan *image* perusahaan meskipun manajer harus melakukan pengorbanan sumber dayanya untuk melakukan aktivitas tersebut (Grey, 1998 dalam Anggraini, 2006).

Dengan adanya kepemilikan manajerial, maka tindakan oportunistik manajer untuk memaksimalkan kepentingan pribadi akan berkurang. Manajer perusahaan akan mengambil keputusan sesuai dengan kepentingan perusahaan yaitu dengan cara mengungkapkan informasi sosial yang seluas-luasnya dalam rangka untuk meningkatkan *image* perusahaan meskipun manajer harus melakukan pengorbanan sumber dayanya untuk melakukan aktivitas tersebut (Anggraini, 2006).

6. Hipotesis 6 : Kepemilikan terkonsentrasi berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan CSR

Pengujian hipotesis 6 pada tabel 5 di atas menunjukkan bahwa variabel kepemilikan terkonsentrasi mempunyai *t* hitung sebesar $3.882 > 1.69$ (*t* tabel). Karena *t* hitung lebih besar daripada *t* tabel maka H_0 ditolak, artinya ada pengaruh signifikan antara kepemilikan terkonsentrasi terhadap luas pengungkapan CSR. Nilai signifikansi yang dihasilkan adalah 0.000 yang berarti lebih kecil dari level 0.05 ($0.000 < 0.05$).

menunjukkan bahwa ada pengaruh signifikan antara kepemilikan terkonsentrasi terhadap luas pengungkapan CSR. Dari hasil pengujian diperoleh bahwa hipotesis 6 yang menyatakan bahwa kepemilikan terkonsentrasi berpengaruh positif terhadap pengungkapan CSR diterima karena hasil pengujian membuktikan bahwa kepemilikan terkonsentrasi berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan CSR dan signifikan.

Hasil penelitian ini konsisten dengan hasil penelitian dari Matoussi dan Chakroun (2008) dan Waryanto (2010). Matoussi dan Chakroun (2008) menyatakan bahwa kepemilikan terkonsentrasi dapat mengurangi kauntitas pemegang saham di perusahaan sehingga dapat mengurangi masalah konflik kepentingan antara pemegang saham dengan manajemen. Hal ini berarti kepemilikan saham terkonsentrasi menjadi mekanisme internal pendisiplinan manajemen. Selain itu juga sebagai mekanisme yang dapat digunakan untuk meningkatkan efektivitas monitoring dengan baik dan menurunkan biaya agensi (Yu dan Shao, 2007) karena dengan kepemilikan yang besar menjadikan pemegang saham memiliki akses informasi yang cukup signifikan untuk mengimbangi keuntungan informasional yang dimiliki manajemen. Adanya informasi yang seimbang dapat mengurangi munculnya masalah agensi antara manajemen dengan para stakeholder sehingga kepentingan dari para stakeholder dapat terpenuhi dan mampu mendorong diungkapkannya CSR dengan lebih luas (Waryanto, 2010).

IX. Simpulan, Saran dan keterbatasan penelitian

a. Simpulan

Berdasarkan pengolahan data penelitian yang dilakukan terhadap 39 sampel perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2008-2010 maka dapat diambil beberapa kesimpulan yaitu : 1. Hasil pengujian secara partial ukuran dewan komisaris, proporsi dewan komisaris, ukuran komite audit, jumlah rapat komite audit, berpengaruh tidak signifikan terhadap luas pengungkapan CSR. Sedangkan kepemilikan manajerial,

kepemilikan terkonsentrasi berpengaruh signifikan terhadap luas pengungkapan CSR.

2. Hasil pengujian statistik secara simultan selama periode penelitian (2008–2010), variabel ukuran dewan komisaris, proporsi dewan komisaris independen, ukuran komite audit, jumlah rapat komite audit, kepemilikan manajerial, dan kepemilikan terkonsentrasi mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap luas pengungkapan CSR. Hasil ini ditunjukkan dengan F_{hitung} sebesar 5.182 sedangkan F_{tabel} sebesar 2.4 ($F_{hitung} > F_{tabel}$) dengan tingkat signifikansi $0,001 < 0,05$.

b. Keterbatasan Penelitian

Adapun keterbatasan-keterbatasan dalam penelitian ini adalah:

1. Terdapat unsur subjektivitas dalam menentukan indeks pengungkapan CSR. Hal ini dikarenakan tidak adanya ketentuan baku yang dapat dijadikan standar atau acuan sehingga penentuan indeks untuk indikator dalam kategori yang sama dapat berbeda untuk setiap peneliti.

2. Tingkat adjusted R^2 yang diuji 39,8% dalam penelitian ini yang menunjukkan bahwa variabel lain yang tidak digunakan dalam penelitian ini mempunyai pengaruh yang lebih besar terhadap pengungkapan CSR.

c. Saran

Merujuk pada hasil dan keterbatasan penelitian, maka saran yang dapat diberikan saran sebagai berikut :

1. Item-item yang harus diungkapkan dalam laporan tanggung jawab sosial perusahaan belum diatur di Indonesia, sehingga untuk menghitung indeks pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan masih mengacu pada aturan internasional dan aturan yang dikeluarkan oleh perusahaan. Oleh karena itu, Bapepam-LK perlu membuat suatu aturan yang mengatur mengenai item-item pengungkapan tanggung jawab sosial yang harus dibuat perusahaan sesuai dengan sektor industrinya dan kondisi yang ada di Indonesia. Dengan demikian perusahaan akan lebih memperhatikan tanggung jawabnya terhadap masyarakat dan lingkungan.

2. Rendahnya tingkat adjusted R^2 yaitu 39,8% dari model yang diuji dalam penelitian ini menunjukkan bahwa variabel lain yang tidak digunakan dalam penelitian ini mempunyai pengaruh yang lebih besar terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Penelitian selanjutnya sebaiknya menambahkan variabel lain seperti variabel dari mekanisme eksternal GCG yang dapat dilihat dari kondisi pasar modal, produk dan pasar tenaga kerja.

3. Penelitian selanjutnya bisa menggunakan indeks penghitungan CSR yang baru yaitu dengan menggunakan pedoman G4 yang saat ini masih dalam tahap pengembangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Hendriksen, Eldon S., dan Michael F. Van Breda. 2000. Teori Akunting terjemahan dari *Accounting Theory*. Interaksara: Jakarta.
- Solihin, Ismail. (2009). *Corporate Social Responsibility From Charity to Sustainability*. Salemba Empat: Jakarta
- Akhmad, Syakhroza. (2005). *Corporate Governance: Sejarah Dan Perkembangan, Teori, Model, Dan System Governance Serta Aplikasinya Pada Perusahaan BUMN*, Pidato Pengukuhan Guru Besar FE UI, FE UI. Jakarta.
- Kailatu, Thomas S. (2006). *Good Corporate Governance Dan Penerapannya di Indonesia*. Fakultas Ekonomi Universitas Kristen Petra Surabaya.
- Lastanti, Hexana Sri. (2005). *Hubungan Corporate Governance Dengan Kinerja Perusahaan Dan Reaksi Pasar*. Konferensi Nasional Akuntansi.
- Michelon, Giovanna & Antonio Parbonetti. (2010). *The Effect of Corporate Governance on Sustainability Disclosure*. Springer Science And Business Media 14 September 2010.
- Muntoro, Ronny Kusuma. (2006). *Membangun Dewan Komisaris yang Efektif*. [makalah]. Jakarta : Universitas Indonesia.
- Suharto, Edi (2008). *Corporate Social Responsibility: What is and Benefits for Corporate*. Disampaikan pada Seminar Dua Hari CSR: Strategy, Management and Leadership, Jakarta 13-14 Februari 2008.
- Utama, Sidharta. 2007. *Evaluasi Infrastruktur Pendukung Pelaporan Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan di Indonesia*. Pidato Ilmiah Pengukuhan Guru Besar FEUI. Jakarta
- Journal**
- Amran, Azlan & S. Susela Devi. (2008). *The Impact of Government And Foreign Affiliate Influence on Corporate Social Reporting (The Case of Malaysia)*. Accounting, Auditing and Accountability Journal. Vol.23, No.4.
- Andri & Hanung. (2007). *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Laba Dan Nilai Perusahaan*. Simposium Nasional Akuntansi X, Makassar.
- Anggraini, Fr. RR. (2006). *Pengungkapan Informasi Sosial Dan Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pengungkapan Informasi Sosial dalam Laporan Keuangan Tahunan (Studi Empiris pada Perusahaan-Perusahaan yang Terdaftar pada Bursa Efek Jakarta)*. Simposium Nasional Akuntansi 9. Pa&g.
- Akhtarudin, Mohamed. Monirul Alam Hossain, Mahmud Hossain, & Lee Yao. (2009). *Corporate Governance And Voluntary Disclosure in Corporate Annual Reports of Malaysian Listed Firms*. JAMAR. Vol7, November.
- Boediono, Gideon SB. (2005). *Kualitas Laba: Studi Pengaruh Mekanisme Corporate Governance Dan Dampak Manajemen Laba dengan Menggunakan Analisis Jalur*. Simposium Nasional Akuntansi 8. Solo.
- Hashim, Hafiza Aishah dan Devi, S. (2007). "Corporate Governance, Ownership Structure, And Earnings Quality: Malaysian Evidence". Universiti Malaya.
- Jensen, Michael C. & Meckling William H. (1976). *Theory of The Firm: Managerial Behavior, Agency Cost, and Ownership Structure*. Journal of Financial Economics 3.
- Matoussi, Hamadi & Chakroun, Raida. (2008). *Board Composition, Ownership Structure and Voluntary Disclosure In Annual Reports: Evidence From Tunisia*. Laboratoire Interdiscipline De Gestion Universite-Entreprise (LIGUE)
- Murwaningsari, Ety. (2009). *Hubungan Corporate Governance, Corporate Social Responsibilities, Dan Performance Corporate Financial Performance Dalam Satu Continuum*. Jurnal Akuntansi & Keuangan. Vol. 11 No. 1 Mei 2009.
- Nasir, Mohd N.A. & Abdullah, S.N. (2004). *Voluntary Disclosure and Corporate Governance Among Financially Distressed Firms in Malaysia*. Financial Reporting, Regulation, and Governance. Vol.3.
- Nurlela & Islahudin. (2008). *Pengaruh Corporate Social Responsibility Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Prosentase Kepemilikan Manajemen Sebagai Variabel Moderating*. Simposium Nasional Akuntansi XI. Pontianak.

- Nuryama.(2008). *Pengaruh Konsentrasi Kepemilikan, Ukuran Perusahaan, Dan Mekanisme Corporate Governance Terhadap Manajemen Laba*.Simposium Nasional Akuntansi 11. Pontianak.
- Rahman, Rashidah Abdul & Ali, Fairuzana Haneem Mohamed. (2006) *,Board, Audit Committee, Culture, and Earning Management: Malaysian Evidence*. Managerial Auditing Journal.Vol 21.
- Rustiarini, Ni Wayan. (2010). *Pengaruh Corporate Governance Pada Hubungan Corporate Social Responsibility Dan Nilai Perusahaan*.Denpasar : Universitas Mahasaraswati.
- Said, Roshima., Yuserrie Hj Zainuddin, & Hasnah Haron. (2009). *The Relationship Between Corporate Governance Characteristics in Malaysian Public Listed Companies*. *Social Responsibility Journal*.Vol.5, No.2, hal.212-226.
- Sayekti & Wondabio.(2007). *Pengaruh CSR Disclosure Terhadap Earnings Response Coefficient*.Simposium Nasional Akuntansi 10.Makasar.
- Sembiring, Eddy Rismanda , (2005). *Karakteristik Perusahaan Dan Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial: Study Empiris Pada Perusahaan Yang Tercatat di Bursa Efek Jakarta*.Simposium Nasional Akuntansi 8. Solo.
- Setyapurnama, Y. S. & Norpratiwi, A. M. V. (2005).*Pengaruh Corporate Governance terhadap Peringkat Obligasi dan Yield Obligasi*.Journal available at www.stieykpn.ac.id/images/artikel/CorporateGovernance.pdf.
- Shaw, J. C. (2003). *Corporate Governance and Risk: A System Approach*. New Jersey: John Wiley & Sons Inc.
- Yu, Guanghua & Shao, Li. (2007).*Against Legal Origin of Ownership Concentration And Disclosure*. University of Hongkong.